

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi serta pertumbuhan penduduk yang cukup cepat telah mempengaruhi tatanan nilai dan budaya suatu bangsa. Banyak permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia sangatlah kompleks dan membutuhkan pendekatan yang cukup rumit untuk memecahkan permasalahan tersebut. Salah satunya saja adalah permasalahan banyak masyarakat-masyarakat yang tidak diberdayakan oleh pemerintah sehingga mereka tidak dapat mensejahterakan kehidupannya.

Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat-masyarakat yang tidak mampu memahami diri dan potensinya, tidak mampu mengarahkan dirinya sendiri, dan tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Pemberdayaan adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jika dilihat dari skill masyarakat Indonesia kurang baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pertama-tama perlu dipahami arti dan makna pemberdayaan, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (empowering) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Pemberdayaan warga belajar merupakan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama.

Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dapat menjalankan pembangunan dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang ada. Masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan pogram pembangunan yang telah mereka tentukan. Dengan demikian masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dai pemerintah maupun pihak lain.

Berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan pemerintah sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, saat ini pemerintah sudah banyak melakukan program pemberdayaan untuk pembangunan di Indonesia diantaranya adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Proyek Peningkatan Masyarakat Pesisir (P4K), dan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Program pemberdayaan yang terbaru adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tujuan dari dilaksanakannya program pemberdayaan ini diharapkan pada tahun 2015 mendatang, tingkat kemiskinan di Indonesia bisa semakin berkurang.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, namun masalah kemiskinan di Indonesia belum dapat terpecahkan. Bahkan, beberapa kebijakan pemerintah, seperti menaikkan harga BBM dan beras, justru menambah panjang daftar masyarakat miskin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berbagai program pemberdayaan di Indonesia belum dapat berjalan secara optimal.

Tidak optimalnya pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan pada dasarnya terjadi karena adanya penyimpangan dalam memahami dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Slamet (2003:62) mengemukakan beberapa penyimpangan dalam memahami dan menjalankan pemberdayaan di Indonesia, diantaranya adalah (a) pemberdayaan ditempuh pemerintah untuk mengubah masyarakat dengan argumen bahwa problem terletak pada diri masyarakat bukan problem yang

bersifat struktural; dan (b) pemberdayaan tidak dijalankan sebagai bentuk pembelajaran dan kemitraan bersama antar subyek, tetapi ada penempatan posisi pemerintah sebagai subyek (yang memberdayakan) dan masyarakat sebagai obyek (yang diberdayakan).

Terjadinya penyimpangan dalam memahami dan menjalankan program pemberdayaan seperti tersebut di atas mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat (pembangunan) dilakukan dari atas ke bawah top down. Masyarakat diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan sehingga kurang bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya. Sebagai akibatnya adalah program pemberdayaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Bahkan bantuan yang diberikan justru menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat daripada menolongnya.

Dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya dan mengetas kemiskinan dan juga untuk pengangguran, maka pemerintah telah melakukan berbagai macam bentuk pembinaan kepada masyarakat pada sektor pendidikan non formal. Bentuk pembinaan yang dapat dilakukan adalah pembinaan sikap mental, pembinaan kerohanian dan memberikan pendidikan pelatihan berbagai jenis keterampilan.

Pendidikan keterampilan diharapkan bukan sekedar memberikan latihan-latihan keterampilan yang bisa digunakan, tetapi juga merupakan bagian dari pembinaan sikap mental para warga belajar agar lebih gigih dalam berusaha dan

mau bekerja keras, dan juga warga belajar yang ikut dalam pendidikan keterampilan diharapkan mampu memiliki keterampilan atau keahlian yang tujuannya untuk memperoleh penghasilan yang sangat berarti dari jasa-jasa yang diberikannya, bisa menopang hidupnya dimasa mendatang dan juga dapat bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya dan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Pemerintah memberdayakan masyarakat dengan cara membuat program-program pada lembaga-lembaga pemerintahan negeri maupun swasta. Dalam hal ini penulis menemukan salah satu usaha pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, yaitu membuat program-program pelatihan keterampilan yang dilakukan di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa dibawah naungan Dinas Sosial dan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Utara. Setelah program pelatihan keterampilan ini selesai diharapkan masyarakat dapat diberdayakan secara utuh dan bertujuan untuk membantu masyarakat pada umumnya warga belajar untuk memahami diri dan potensinya, mampu mengarahkan dirinya, memiliki kemampuan bekerjasama sosial dan dapat bertanggung jawab atas semua tindakannya. Program pelatihan ini belum berjalan secara maksimal. Warga belajar yang mempunyai keahlian keterampilan sangat

susah untuk melanjutkan atau mengembangkan keahliannya karena ketiadaan dana yang cukup untuk membuka usaha.

Pemberdayaan bertujuan untuk memahami diri dan potensi warga belajar, mampu mengarahkan dirinya sendiri, dapat melakukan kerjasama sosial dan bisa bertanggung jawab atas semua tindakannya, tetapi pada kenyataannya proses pemberdayaan di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja belum mengarah kepada pemberdayaan itu sendiri, disana lebih menekankan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada warga belajar tetapi tidak mengacu pada tujuan akhir program pemberdayaan, proses pembelajaran bimbingan sosial yang diberikan oleh tutor dianggap masih kurang oleh warga belajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menemukan jawaban yang menyangkut tentang pemberdayaan warga belajar dan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di panti tersebut. Dari hasil permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Warga Belajar Melalui Pelatihan Keterampilan di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal di atas dan uraian pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah berkenaan dengan penelitian ini adalah :

1. Telah dilakukan berbagai bentuk keterampilan bagi warga belajar, tetapi banyak diantara mereka belum memiliki keberdayaan.
2. Pemberdayaan yang dilakukan masih kurang mengindahkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

3. Program pelatihan keterampilan yang dilaksanakan belum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga belajar.
4. Program pelatihan keterampilan yang dilakukan di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja belum berjalan maksimal.

### **C. Batasan Masalah**

Dari permasalahan di atas, maka penulis membatasi permasalahan dengan mengambil satu permasalahan yaitu pemberdayaan warga belajar melalui program pelatihan keterampilan di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja belum berjalan maksimal.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Seberapa Baik Proses Pemberdayaan Warga Belajar Melalui Program Pelatihan Keterampilan di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa ?”

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui keberdayaan warga belajar melalui pelatihan keterampilan di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa baik program pelatihan keterampilan yang telah dilakukan oleh pemerintah di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa.